



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RADOT PARULIAN, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. HERMON DEKRISTO, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2025,

Pihak Kedua,  
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI  
  
DR. HERMON DEKRISTO, S.H., M.H.

Pihak Pertama,  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
TANJUNG JABUNG BARAT  
  
RADOT PARULIAN, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2025**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	94%
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	84%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	80%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	76
		Nilai Kinerja Anggaran	90

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.607.208.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.980.172.000,-
Jumlah		Rp. 9.587.380.000,-

#### D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Kuala Tungkal, Januari 2025,

Pihak Kedua,

  
**KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI**  
**DR. HERMON DEKRISTO, S.H., M.H.**

Pihak Pertama,

  
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI**  
**TANJUNGPINANG JABUNG BARAT**  
**RADOT PARULIAN, S.H., M.H.**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH. FADEL ISTIQLAL, S.H  
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RADOT PARULIAN, S.H., M.H  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
TANJUNG JABUNG BARAT,

  
(RADOT PARULIAN, S.H., M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

  
(MUH. FADEL ISTIQLAL, S.H)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG**  
**BARAT**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	91
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	65%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing	80%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	hukum	Satker	

No	Kegiatan	Anggaran
1	Dukungan Manajemen	Rp 7.804.172.000
2	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp 176.000.000
	Jumlah	Rp 7.980.172.000

**D. PRIORITAS NASIONAL**

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
TANJUNG JABUNG BARAT,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

  
(RABOTI PARULIAN, S.H., M.H)

  
(MUH. FADEL ISTIQLAL, S.H)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. NENDRI ADIYANTO, S.H., M.H  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RADOT PARULIAN, S.H., M.H  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
TANJUNG JABUNG BARAT,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

(RADOT PARULIAN, S.H., M.H)

(M. NENDRI ADIYANTO, S.H., M.H)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG**  
**BARAT**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	100%
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	81%
		Persentase perkara tindak pidana	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		umum yang diproses hingga Penuntutan	76%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	76%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	95%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Prapenuntutan	32.670.000
2	Penuntutan	677.600.000
3	Eksekusi	37.000.000
4	Restorative Justice (RJ)	9.264.000
Jumlah		756.534.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

-

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
TANJUNG JABUNG BARAT,

  
(RADO PARULIAN, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

  
(M. NENDRI ADIYANTO, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGRIN NICO REVAL, S.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RADOT PARULIAN, S.H., M.H  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
TANJUNG JABUNG BARAT,

  
(RADOT PARULIAN, S.H., M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA  
KHUSUS,

  
(AGRIN NICO REVAL, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS**  
**KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	90%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	90%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	50%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	50%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	50%
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	50%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	50%
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	0
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	0
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	0

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelidikan	92.082.000,-
2	Penyidikan	206.000.000,-
3	Prapenuntutan dan Penuntutan	141.728.000,-
4	Eksekusi	11.080.000,-
	Jumlah	450.890.000,-

#### D. PRIORITAS NASIONAL

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
TANJUNG JABUNG BARAT,

  
(RADOT PARULIAN, S.H., M.H.)  


Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA  
KHUSUS,

  
(AGRIN NICO REVAL, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AIDIL RAYA PUTERA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RADOT PARULIAN, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
TANJUNG JABUNG BARAT,

  
(RADOT PARULIAN, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA  
USAHA NEGARA,

  
(AIDIL RAYA PUTERA, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**  
**KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi (NIHIL)	0%
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi sebanyak 5 Perkara	90%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi sebanyak 1 Perkara	90%
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata (NIHIL)	0%
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum sebanyak 3 Kegiatan pelayanan hukum 12 Kegiatan tindakan hukum lain (NIHIL)	92%
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	98%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pertimbangan Hukum / Pendampingan Hukum / Bantuan Hukum	Rp 11.040.000,-
2	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa	Rp 24.000.000,-
3	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp 26.775.000,-
4	Pengelolaan Halo JPN	Rp 6.000.000,-
5	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum	Rp 7.200.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 75.015.000,-</b>

**D. PRIORITAS NASIONAL**

-

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Kuala Tungkal, Januari 2025

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
TANJUNG JABUNG BARAT,



(RADOY BARULTAN, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA  
USAHA NEGARA,



(AIDIL RAYA PUTERA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD LUTFI, S.H., M.H  
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RADOT PARULIAN, S.H., M.H  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
TANJUNG JABUNG BARAT,

  
(RADOT PARULIAN, S.H., M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

  
(MUHAMMAD LUTFI, S.H., M.H)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	75%
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	75%
3	Meningkatnya pelaksanaan	Persentase pelaksanaan Operasi	75%

<b>No</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
	Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	75%
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	100%
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	75%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	75%
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	75%

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1	Kegiatan Pengamanan dan Penggalangan	Rp. 40.000.000
2	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Rp. 58.008.000
3	Kampanye Anti Korupsi	Rp. 20.000.000
4	Penerangan Hukum	Rp. 38.976.000
5	Penyuluhan Hukum	Rp. 52.400.000
	a. Jaksa Masuk Sekolah	Rp. 28.000.000
	b. Jaksa Menyapa	Rp. 24.400.000
	Jumlah	Rp. 209.384.000

#### **D. PRIORITAS NASIONAL**

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

#### **E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
TANJUNG JABUNG BARAT,

  
(RADHI FARUQ, S.H., M.H)



Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

  
(MUHAMMAD LUTFI, S.H., M.H)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIFO CUNDRA, S.H., M.H  
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RADOT PARULIAN, S.H., M.H  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
TANJUNG JABUNG BARAT,

  
(RADOT PARULIAN, S.H., M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN  
PENGELOLAAN BB,

  
(RIFO CUNDRA, S.H., M.H)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI**  
**KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	90%
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	90%
2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	84%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan Barang Bukti	Rp. 50.000.000
2	Pemusnahan Barang Bukti	Rp. 20.000.000
3	Penyelesaian Barang Bukti	Rp. 70.000.000
	Jumlah	Rp. 110.000.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

Penerimaan PNBP sebanyak Rp. 479.254.000 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian lelang sebesar Rp. 461.572.000 (empat ratus enam puluh satu lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang rampasan sebesar Rp. 17.682.000 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
TANJUNG JABUNG BARAT,

  
(RABOT FARULIAN, S.H., M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN  
PENGELOLAAN BB,

  
(RIFO CUNDR, S.H., M.H)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUVITA ARDIANI, S.H  
Jabatan : KEPALA URUSAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN, DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUH. FADEL ISTIQLAL, S.H  
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala SubBagian Pembinaan,



(MUH. FADEL ISTIQLAL, S.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Urusan Tata Usaha  
Kepegawaian dan Keuangan, dan  
Penerimaan Negara Bukan Pajak,

(YUVITA ARDIANI, S.H)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA URUSAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN, DAN**  
**PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**  
**KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	91

No	Rincian Output	Anggaran
1	Layanan Umum	Rp. 30.000.000,-

Jumlah	Rp. 30.000.000,-
--------	------------------

**D. PRIORITAS NASIONAL**

-

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Subbagian Pembinaan,



(MUH. FADEL ISTIQLAL, S.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawaian  
dan Keuangan, dan Penerimaan Negara  
Bukan Pajak,

(YUVITA ARDIANI, S.H)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ALI  
Jabatan : KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN, DATA STATISTIK  
KRIMINAL DAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN  
PERPUSTAKAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUH. FADEL ISTIQLAL, S.H  
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI  
TANJUNG JABUNG BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Subbagian Pembinaan,

(MUH. FADEL ISTIQLAL, S.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Urusan Perlengkapan, Data  
Statistik Kriminal dan Teknologi, Informasi  
dan Perpustakaan

(MUHAMMAD ALI)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN, DATA STATISTIK KRIMINAL DAN**  
**TEKNOLOGI, INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN**  
**KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	65%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Layanan Sarana Internal	Rp. 176.000.000,-

Jumlah	Rp. 176.000.000,-
--------	-------------------

**D. PRIORITAS NASIONAL**

-

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Kuala tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Subbagian Pembinaan,



(MUH. FADEL ISTIQLAL, S.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi, Informasi dan Perpustakaan



(MUHAMMAD ALI)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROBY NOVAN RONAR, S.H  
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN  
EKSAMINASI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. NENDRI ADIYANTO, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN  
NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum,



(M. NENDRI ADIYANTO, S.H., M.H)

Pihak Pertama,

Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi  
dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum,

(ROBY NOVAN RONAR, S.H)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI, DAN EKSAMINASI**  
**TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	76%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap ( <i>in kracht van gewusjdezaak</i> ) yang telah dieksekusi	76%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Penuntutan	Rp. 677.600.000,-
2	Eksekusi	Rp. 37.000.000,-
Jumlah		Rp. 714.600.000,-

**D. PRIORITAS NASIONAL**

-

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum,



(M. NENDRI ADIYANTO, S.H., M.H)

Pihak Pertama,

Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi  
dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum,



(ROBY NOVAN RONAR, S.H)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R.A FACHRI AJI SAPUTRA, S.H  
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN  
OPERASI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGRIN NICO REVAL, S.H  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN  
NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,



(AGRIN NICO REVAL, S.H)

Pihak Pertama,

Kasubsi Penyidikan dan Pengendalian  
Operasi pada Seksi Tindak Pidana  
Khusus,

(R.A FACHRI AJI SAPUTRA, S.H)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN OPERASI PADA SEKSI**  
**TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	50 %
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	50 %

No	Rincian Output	Anggaran
1	Penyelidikan	Rp. 92.082.000,-
2	Penyidikan	Rp. 206.000.000,-
Jumlah		Rp. 298.082.000,-

**D. PRIORITAS NASIONAL**

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,



(TAGRIN NICO REVAL, S.H)

Pihak Pertama,

Kasubsi Penyidikan dan Pengendalian  
Operasi pada Seksi Tindak Pidana  
Khusus,

(R.A FACHRI AJI SAPUTRA, S.H)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : REKI AFRIZAL, S.H  
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA, DAN EKSEKUSI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGRIN NICO REVAL, S.H  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS TANJUNG JABUNG BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,



(AGRIN NICO REVAL, S.H)

Pihak Pertama,

Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya  
Hukum Luar Biasa, dan Eksekusi,

(REKI AFRIZAL, S.H)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA, DAN**  
**EKSEKUSI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI**  
**TANJUNG JABUNG BARAT**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	50 %
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	50 %
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	50 %

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	0
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	0
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	0

N	Rincian Output	Anggaran
1	Pra Penuntutan dan Penuntutan	Rp. 141.728.000,-
2	Eksekusi	Rp. 11.080.000,-
Jumlah		Rp. 152.808.000,-

**D. PRIORITAS NASIONAL**

-

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,



(AGRINICO REVAL, S.H)

Pihak Pertama,

Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksekusi,

(REKI AFRIZAL, S.H)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ULFA WIRANTY ALDIRA, S.H  
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AIDIL RAYA PUTERA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha  
Negara



(AIDIL RAYA PUTERA, S.H., M.H)

Pihak Pertama,

Kepala Subseksi Perdata dan Tata  
Usaha Negara,

(ULFA WIRANTY ALDIRA, S.H)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi (NIHIL)	0%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi sebanyak 5 Perkara	90%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi 1 Perkara	90%
2	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur	0%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Perdata (NIHIL)	

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp. 26.775.000,-
2	Pengelolaan HALO JPN	Rp. 6.000.000,-
3	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Rp. 7.200.000,-
	Jumlah	Rp. 39.975.000,-

**D. PRIORITAS NASIONAL**

-

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha  
Negara,

Kepala Subseksi Perdata dan Tata  
Usaha Negara,



(AIDIL RAYA PUTERA, S.H., M.H)

(ULFA WIRANTY ALDIRA, S.H)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DANI TRI WIBOWO, S.H., M.H  
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI I PADA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG  
JABUNG BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Seksi Intelijen,

  
(MUHAMMAD LUTFI, S.H., M.H)

Pihak Pertama,  
Kepala Subseksi I pada Seksi Intelijen,

  
(DANI TRI WIBOWO, S.H., M.H)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SUBSEKSI I PADA SEKSI INTELIJEN  
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	75%
2	Meningkatnya dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri	Persentase pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri	75%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Rp. 58.008.000,-
2	Kampanye Anti Korupsi	Rp. 20.000.000,-
3	Penerangan Hukum	Rp. 38.976.000
4	Penyuluhan Hukum	Rp. 52.400.000
Jumlah		Rp. 169.384.000,-

**D. PRIORITAS NASIONAL**

-

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Kuala Tungkal, 30 Januari 2025


Pihak Kedua,

Kepala Seksi Intelijen,

  
(MUHAMMAD LUTFI, S.H., M.H)

Pihak Pertama,

Kepala Subseksi I pada Seksi Intelijen,

  
(DANI TRI WIBOWO, S.H., M.H)